



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT

Tahun 2023

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

@2024



**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARA KAN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA TARA KAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.
- Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai. Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2024

Inspektur,



Abd. Azis Hasan, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 19750212 199501 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja.

Capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja tahun keempat RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 99,99%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Inspektorat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp7.372.696.025,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023 adalah sebesar Rp6.877.766.990,- atau 93,29%.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kota Tarakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 sasaran yang mencakup 8 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2023 mencapai 99,99% atau bermakna Sangat Tinggi** Dengan uraian : 4 (empat) sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021 - 2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Inspektorat Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP
Inspektorat Kota Tarakan
Tahun 2023,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah	4
D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
C. Indikator Kinerja Utama	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Pengukuran Kinerja	20
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	58
D. Penghargaan yang Diterima	65
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Kota Tarakan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) Rencana Strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan 2019-2024; (2) Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan



Tahun 2023; dan (3) Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tarakan No. 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kota Tarakan mempunyai fungsi:

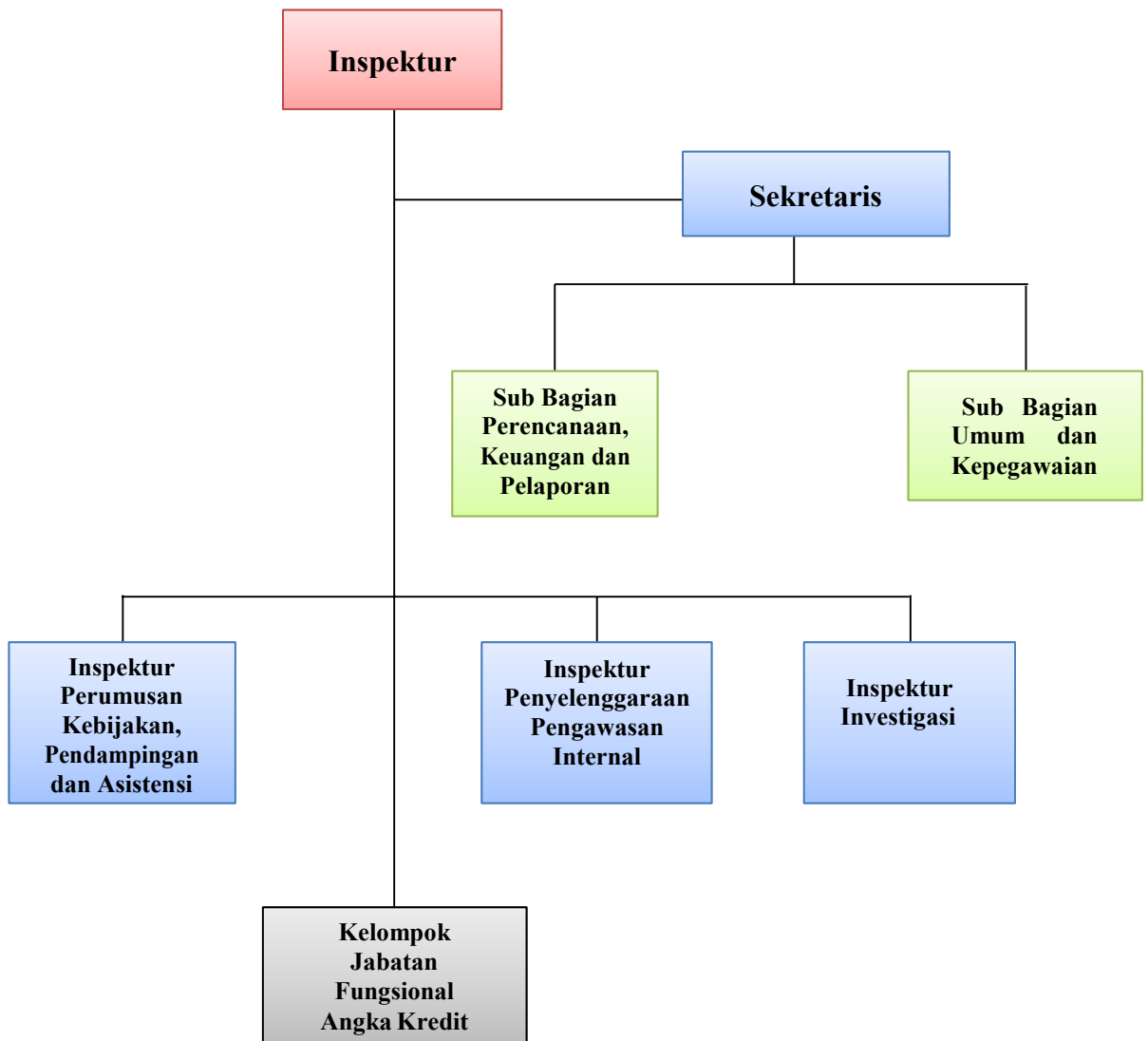
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Tarakan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- c. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- d. Inspektur Investigasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawas, maka Inspektorat Kota Tarakan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan.

Aparat Pemerintah yang ada di Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kota Tarakan
Per Desember 2023

No	Bagian/ Bidang	Jumlah ASN	L	P	Tingkat Pendidikan						
					SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Inspektur	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	6	3	3	-	2	-	-	3	1	-
3	Irban	3	2	1	-	-	-	-	2	1	-
4	Auditor Madya	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-
5	Auditor Muda	7	3	4	-	-	-	-	7	-	-
6	Auditor Pertama	5	3	2	-	-	-	-	5	-	-
7	Auditor Penyelia	4	1	3	-	-	4	-	-	-	-
8	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-
9	Auditor Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PPUPD Muda	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11	PPUPD Pertama	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Total		32	15	17	-	2	6	-	21	3	-

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat, 2023



D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi atau diklasifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan, yaitu permasalahan pada pengelolaan kinerja dan keuangan daerah di perangkat daerah belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Pada tataran kebijakan Inspektorat Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan sebagai berikut :

1. Pencegahan korupsi belum optimal;
2. Belum semua perangkat daerah memahami pengelolaan risiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah sehingga masih perlu pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah SD/SMP sehingga perlu direviu;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, BUMD;
7. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
8. Belum ada perangkat daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Bertambahnya aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat (*Gratifikasi, Whistle Blowing System* dan Benturan Kepentingan);
10. Kualitas dan kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban dan kewenangannya.



Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kota Tarakan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Inspektorat Kota Tarakan, faktor internal yang mempengaruhi Inspektorat Kota Tarakan antara lain :

1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran penunjang pelaksanaan tugas;
2. Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia APIP terbatas;
3. Kuantitas sumber daya manusia tenaga fungsional umum belum tercukupi.



Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kota Tarakan adalah :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
2. Belum semua perangkat daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada perangkat daerah;
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah;
5. Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaporan di semua perangkat daerah (Reviu LKjIP Kota, Evaluasi SAKIP, Evaluasi LPPD, Reviu Renja dan Reviu Renstra) disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Belum optimalnya pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan negara di semua perangkat daerah dan sekolah SD/SMP (Reviu RKA, RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD Kota pada perangkat daerah disebabkan penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan belum optimal.



3. Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan kinerja pada BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa disebabkan belum optimalnya laporan keuangan BUMD, sekolah dan perangkat daerah;
4. Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan disebabkan masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut LHP;
5. Sistem Pengendalian Intern belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan risiko, regulasi baru terkait penilaian SPIP terintegrasi serta jumlah dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan;
6. Belum ada perangkat daerah yang lolos dan mendapatkan predikat WBBM dan WBK disebabkan oleh belum optimalnya nilai perangkat daerah yang diajukan penilaiannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Banyak aduan yang masuk di Inspektorat dan perlu ditangani disebabkan oleh masih terdapat gratifikasi, aduan *whistle blowing* dan benturan kepentingan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kota Tarakan. Renstra Inspektorat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Inspektorat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Inspektorat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kota Tarakan, antar perangkat daerah dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk



dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran RPJMD. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat adalah:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah
- Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City

No	Tujuan	Tujuan indikator	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir (2024)
Misi II : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Rakyat											
Sasaran 4 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan											
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam PKPT	%	96	97	98	100
					2	Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	%	95	96	97	98
					3	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (KAPIP)	Level	3	3,1	3,2	3,3
			2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	97	98	99	100
					2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Selesai Ditindaklanjuti	%	87	88	89	90
					3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	%	88	89	89,5	90
				Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	%	95	96	97	98
				Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	3	3,1	3,2	3,3

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023, serta dokumen Pengesahan Anggaran dan Perubahannya Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam PKPT	98%
		Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	97%
		Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (KAPIP)	3,2
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	99%
		Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Selesai Ditindaklanjuti	89%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai ditindaklanjuti	89,5%
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	Persentase PD dengan kriteria “Baik” dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	97%
4	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,2

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja sasaran di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 2 (dua) program kerja dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.984.628.600,-

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja sbb :



Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2023		BIDANG
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah				
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
	✓ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	233.094.600	Irbn 1
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda	30 Laporan	545.700.000	Irbn 2
	✓ Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	15 Laporan	345.270.000	Irbn 2
	✓ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	97.750.000	Irbn 3
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
	✓ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yg Ditangani	4 Laporan	40.987.500	Irbn 3
	✓ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	177.325.200	Irbn 3
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	2 Laporan	55.420.000	Irbn 2
	✓ Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	92.140.000	Irbn 2
4	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	150.038.990	Irbn 2
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
	✓ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	30 Rekomendasi	41.310.000	Irbn 1
Total Anggaran Program Prioritas				1.779.036.290	

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



b. Program Pendukung

NO	SASARAN / PROGRAM /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2022		BIDANG
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org/Bln	4.629.446.825	Sekretariat
	✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.536.000	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	11.200.000	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.054.420	Sekretariat
	✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	107.995.000	Sekretariat
	✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	44.997.200	Sekretariat
	✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.999.680	Sekretariat
	✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20.000.000	Sekretariat
	✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	7 Laporan	126.644.600	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	4.300.000	Sekretariat
	✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.500.000	Sekretariat
	✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	65.000.000	Sekretariat
	✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	32.336.500	Sekretariat
	✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.980.000	Sekretariat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi				
	✓ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jml PD yg Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda	4 PD	9.112.660	Irban 1
	✓ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	10 Perangkat Daerah	139.999.660	Irban 1
	✓ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	35.327.190	Irban 1
	✓ Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	20.230.000	Irban 1
Total Anggaran Program Pendukung				5.593.659.735	

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024.



Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tarakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik professional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Jumlah SOP Kegiatan Pengawasan/Jumlah Jenis Kegiatan Pengawasan PKPT x 100%</i>	Inspektorat	Sekretaris
	Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik professional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Jumlah Auditor PPUPD Bersertifikat Pengawasan/Jumlah Auditor/PPUPD x 100%</i>	Inspektorat	Irban 1
	Level Pencapaian KapabilitasAparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Karakteristik Level Kapabilitas APIP terbagi dalam 5 Level yaitu mulai dari terendah Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastruktur), Level 3 (Integrated), Level 4 (Management), Level 5 (Optimizing) merupakan model yang menggambarkan hal-hal mendasarkan yang mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP</i>	BPKP	Inspektur
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik professional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formula : Jumlah Pengawasan PKPT yang Terlaksana/Jumlah Pengawasan PKPT x 100%</i>	Inspektorat	Irban 2
	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	Indikator persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi :Jumlah Temuan yang Ditindaklanjuti/Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan APIP x 100%</i>	Inspektorat	Irban 3
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	Indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti (Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan yang dikeluarkan BPK RI)</i>	BPK RI	Irban 3
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada PD	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria baik dalam evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria “Baik” dalam evaluasi AKIP. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Jumlah Perangkat Daerah Kriteria “Baik” dalam evaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah x 100%</i>	Menpan RB Inspektorat	Inspektur
Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam SPIP	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Karakteristik nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi : Tingkat MRI (belum dinilai 0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP</i>	BPKP	Inspektur

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Sesuai dengan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023, implementasinya mencakup pelaksanaan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dan 9 (sembilan) Kegiatan serta 3 (tiga) Program untuk mendukung pencapaian sasaran strategik.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017



Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	1	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	98,00	100,00	102,04
		2	Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	97,00	100,00	103,09
		3	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3,20	3,00	100,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	4	Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai PKPT	99,00	100,00	101,01
		5	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	89,00	89,16	100,18
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	89,50	87,50	97,77
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	7	Persentase PD dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi SAKIP	97,00	100,00	103,09
4	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	8	Manajemen Risiko Indeks(MRI)	3,20	2,97	92,81
CAPAIAN KINERJA						99,99

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Pencapaian kinerja 4 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	4
2	76 s/d <90	Tinggi	-
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d <65	Rendah	-
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			4

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023

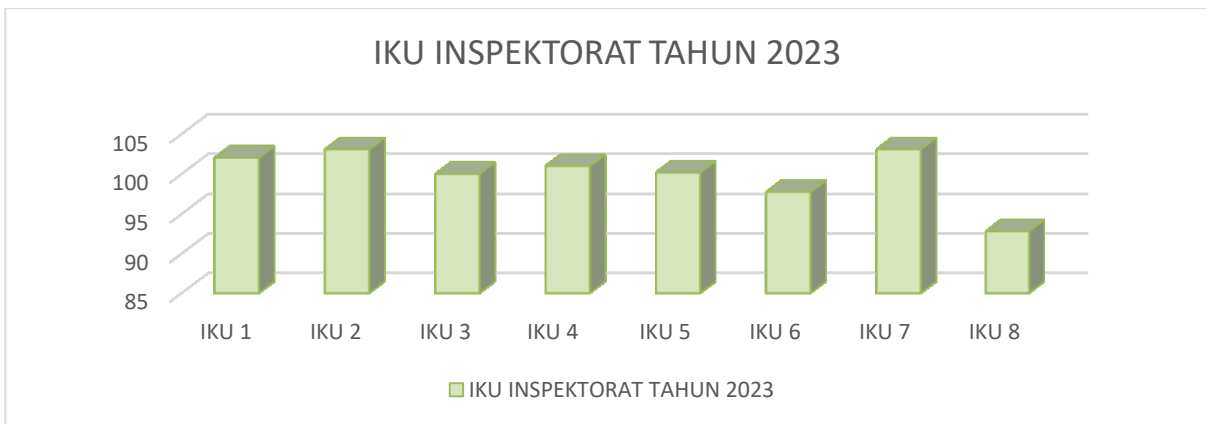


Melihat pada tabel 3.2 capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 tertinggi yaitu pada indikator kinerja sasaran (7) Persentase PD dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi SAKIP, dengan target 97,00% realisasi 100,00% dengan tingkat capaian sebesar 103,09% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) begitu juga untuk capaian (2) Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan mencapai 100,00% dari target 97,00% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Selanjutnya capaian (1) Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) mencapai 102,04% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (4) Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terealisasi 101,01% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), capaian (5) Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti terealisasi 100,18% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (3) Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah terealisasi 100,00% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (6) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti sebesar 97,77% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), serta capaian (8) Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 92,81% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan yaitu 99,99% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran IKU Inspektorat Tahun 2023 seperti pada gambar 3.4 dibawah ini :



Gambar 3.4
Pengukuran IKU Inspektorat Tahun 2023



Melihat pada grafik 3.4 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7 dan IKU 8 seluruhnya adalah dengan predikat kinerja Sangat Tinggi dengan predikat kinerja tertinggi di IKU 7 sebesar 103,09% dan terendah di IKU 8 dengan predikat kinerja yang sama sebesar 92,81%. Jika dilakukan perhitungan capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 adalah sebesar 99,99% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

1. Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Persentase Auditor dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang Bersertifikat Pengawasan
3. Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP)

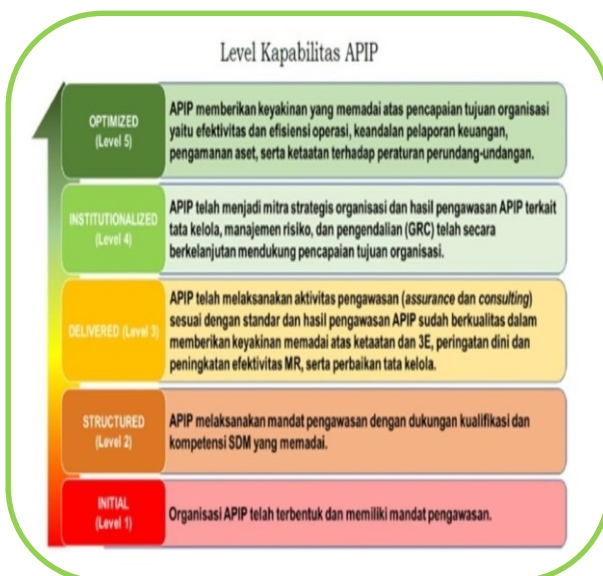
Untuk meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Tarakan melakukan beberapa pencapaian yang antara lain adalah adanya SOP untuk setiap jenis kegiatan pengawasan dalam Program Kerja



Pengawasan Tahunan (PKPT), Auditor dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang Bersertifikat Pengawasan, dan Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP).

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat.

Secara ringkas level Internal Audit Capability Model (IA-CM) dan matriknya disampaikan dibawah ini :



Matriks Karakteristik Level Kapabilitas APIP

KARAKTERISTIK	Organisasi dan Mandat Pengawasan	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Aktivitas Pengawasan Sesuai Standar	Hasil Pengawasan APP yang Berkualitas	APIP Menjadi Mitra Strategis Organisasi	Keyakinan Memadai Atas Pencapaian Tujuan Organisasi
LEVEL						
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗



Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dengan ruang lingkup :

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarakan atas 18 topik untuk periode penilaian tahun 2023.
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri.
3. Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan.
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan atas 18 topik untuk periode penilaian mandiri mulai dari Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

Kegiatan evaluasi atas penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi, serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Kota Tarakan dan para *stakeholder* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Ada 13 jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengawasan yang telah disusun sesuai setiap kegiatan pengawasan yang ada pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Tarakan, antara lain :

1. Audit Kinerja dan Ketaatan;
2. Audit Tujuan Tertentu/Khusus;
3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



5. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat;
6. Reviu Dana Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
8. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
9. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
10. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
11. Tugas Pembantuan/Asistensi;
12. Jasa *Advice*;
13. Hubungan Kerja antara APIP dengan Tim Pemantau Kinerja Inspektorat.

Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yaitu Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{SOP Kegiatan Pengawasan}}{\sum \text{Jenis Kegiatan Pengawasan PKPT}} \times 100\%$$

$$\frac{20 \text{ SOP Kegiatan Pengawasan}}{20 \text{ Kegiatan Pengawasan PKPT}} \times 100\% = 100,00\%$$

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan

Kompetensi SDM Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023 ada sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang bersertifikat pengawasan terdiri dari auditor sebanyak



20 (dua puluh) orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 2 (dua) orang. Daftar SDM Inspektorat yang bersertifikat pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Daftar Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) yang Bersertifikat Keahlian

No	N a m a	Jabatan	Sertifikat
1	Shinta Damayanti, SE.	Auditor Madya	Telah Bersertifikat
2	Emy Asfiany, SE, Ak.	Auditor Madya	Telah Bersertifikat
3	Hj. Erni, SE.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
4	Erni, SE.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
5	Emi Kusriani, SE.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
6	Rini Rosalina, S.Pi.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
7	Benyamin Manan Tulak, S.Pd.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
8	Sepriyanto Kolo Andik, ST.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
9	Eko Budi Purnomo, SE.	Auditor Muda	Telah Bersertifikat
10	Harsono Wijaya, ST.	Auditor Pertama	Telah Bersertifikat
11	Abdul Karim, SH.	Auditor Pertama	Telah Bersertifikat
12	Ariani, SH.	Auditor Pertama	Telah Bersertifikat
13	Rizal Poillot, ST.	Auditor Pertama	Telah Bersertifikat
14	Ratna Yuliaty, S.IP.	Auditor Pertama	Telah Bersertifikat
15	Iris Rumtanyingsih, A.Md.	Auditor Penyelia	Telah Bersertifikat
16	Rahmat Hidayat, A.Md.	Auditor Penyelia	Telah Bersertifikat
17	Sumarni, A.Md.	Auditor Penyelia	Telah Bersertifikat
18	Nur Hariany, A.Md.	Auditor Penyelia	Telah Bersertifikat
19	Sulistiyani, A.Md..	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	Telah Bersertifikat
20	Leni Miniarni, A.Md.	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	Telah Bersertifikat
21	Aril, SE.	PPUPD Muda	Telah Bersertifikat
22	Wida Rhamadani, SE.	PPUPD Pertama	Telah Bersertifikat

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Tarakan 2023



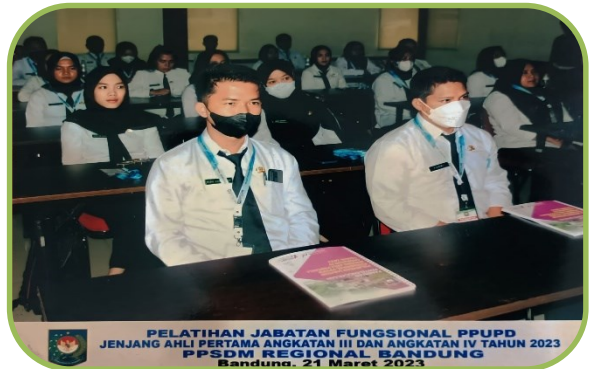
Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yaitu Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Pengawasan}}{\sum \text{Auditor dan PPUPD}} \times 100\%$$

$$\frac{20 \text{ Org Auditor} + 2 \text{ Org PPUPD (Bersertifikat Pengawasan)}}{22 \text{ Orang (Auditor+PPUPD)}} \times 100\% = 100,00\%$$



Rapat Penyusunan SOP Pengawasan



Diklat Jabatan Fungsional PPUPD Pertama (BPKP)



Diklat Audit IT (BPK Yogyakarta)



Monitoring AOI Kapabilitas APIP oleh BPKP



3. Indikator Kinerja Utama 3

**Nilai Capaian : Level Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yg dikeluarkan oleh BPKP**

Untuk meningkatkan kualitas APIP Inspektorat Kota Tarakan harus melakukan pemenuhan data pendukung dari 6 elemen dan 18 topik yang dinilai. Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarkana dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menghitung Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

**Nilai Capaian : Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3)
Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP**

Tingkat Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) = Level 3

Pada tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara melakukan penilaian terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarakan dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan

No	Elemen	Topik	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	3
2	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	3
		4. Program Penjamian dan Peningkatan Kualitas	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	3
		6. Pelaksanaan Anggaran	3
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	3
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	3



No	Elemen	Topik	Level
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	3
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	3
5	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	3
		13. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	3
		14. Hubungan Pelaporan	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	3
		16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	3
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	3
		18. Jasa Konsultasi (<i>Advisory Service</i>)	3

Sumber : BPKP, 2023

Penetapan hasil evaluasi penilaian Kapabilitas APIP pada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Penetapan Hasil Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kapabilitas APIP	
		Skor	Level
Provinsi Kalimantan Utara			
1	Kabupaten Nunukan	3,000	3
2	Kabupaten Malinau	2,080	2
3	Kota Tarakan	3,000	3
4	Kabupaten Bulungan	3,000	3
5	Kabupaten Tana Tidung	3,000	3

Sumber : BPKP, 2023

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan indikator kinerja Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam



Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan, dan Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas internal Pemerintah Tahun Keempat (2023)

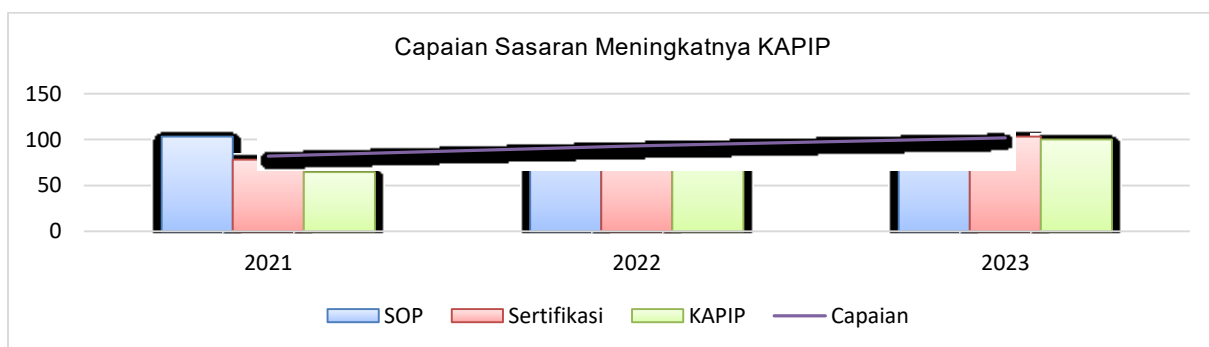
Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun (%)		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir RPJMD (%)
	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)			
Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam PKPT	103,09	102,04	98,00	100,00	102,04	100,00	100,00
Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	78,13	83,76	97,00	100,00	103,09	98,00	100,00
Level Pencapaian Kapabilitas APIP*	64,52	93,75	3,20	3,00	100,00	3,30	3,00
Rata-Rata Capaian Kinerja	81,91	93,18			101,71		

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023 *BPKP, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai 101,71% dengan kategori Sangat Tinggi hampir sebanding dengan tahun sebelumnya yang mencapai 93,18% dengan kategori Sangat Tinggi di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 81,91% dengan kategori Tinggi.

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2023 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.9
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023



Hal ini disebabkan karena indikator kinerja Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan adalah indikator yang bersifat output. Sedangkan indikator kinerja Level Pencapaian Kapabilitas Aparat



Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) targetnya adalah level bukan skor sehingga nilainya seharusnya tidak memiliki angka dibelakang koma. Tingkat Kualitas APIP belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3 berdasarkan laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) dikarenakan Inspektorat Kota Tarakan telah mengimplementasikan topik secara baik dan terus menerus sebagai berikut :

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Topik Perencanaan SDM Level 3

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan dengan adanya hasil analisis jabatan di lingkungan Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan rekrutmen di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tarakan dan telah dilaksanakan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM yang kompeten sesuai dengan kualifikasi/kriteria.
- (3) Melakukan penempatan dan pola mutasi sesuai kebutuhan dengan adanya Surat Edaran Inspektur Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Rotasi dan Mutasi Internal APIP di Lingkungan Inspektorat, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor SPMT.84/107/Insp Tahun 2021.

b. Topik Pengembangan SDM Profesional APIP Level 3

- (1) Pengembangan SDM Inspektorat Kota Tarakan telah memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi, Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi



profesional penunjang pengawasan yang dapat dilihat pada rencana dan realisasi diklat tahun 2021, dan Membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim seperti dalam Sertifikasi Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Surat Tugas AKIN serta Sertifikasi Auditor.

- (2) Melaksanakan pengembangan SDM yang memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun.
- (3) Memberikan penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim Penilai.
- (4) Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi baik sebagai pengurus maupun mengikuti seminar dan rapat dengan dihadirinya Undangan Seminar dan Kongres IPKN.

2. Elemen Praktik Profesional

a. Topik Perencanaan Pengawasan Level 3

Penyusunan PKPT Inspektorat Kota Tarakan telah :

- (1) Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi pemerintah daerah serta indikator capaian sasaran dan pemahaman proses bisnis yang terdapat pada kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- (2) Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan yang dituangkan dalam kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- (3) Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya seperti SDM, waktu, dan anggaran dengan melakukan pemilihan objek pengawasan menggunakan kertas kerja Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) berdasarkan risiko tertinggi.



- (4) Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran dan ruang lingkup, serta jadwal pengawasan, anggaran serta SDM dalam Keputusan Wali Kota Tarakan.
- (5) Mendapatkan persetujuan pimpinan daerah, yaitu ditetapkannya Keputusan Wali Kota Tarakan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Tarakan TA 2023.

b. Topik Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Level 3

- (1) Melakukan pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
- (2) Melakukan penilaian secara berkala baik secara mandiri maupun oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit dalam bentuk reviu internal.
- (3) Melakukan penilaian ekstern secara berkala sesuai dengan standar dalam bentuk telaah sejawat antar APIP dengan Inspektorat Kabupaten Nunukan dan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- (4) Melaporkan hasil QAIP dalam Laporan Pelaksanaan Reviu Internal Inspektorat Tahun 2021 dan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- (5) Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dengan adanya dokumentasi atas komitmen terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.



3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a. Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP Level 3

Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat menjadi :

- (1) Acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dengan selarasnya sasaran dan indikator kinerja sasaran.
- (2) Acuan dalam penyusunan PKPT tahun 2023 yang memuat rencana kerja pengawasan untuk mencapai sasaran Renja dengan mengoptimalkan sumber daya yang disediakan dalam RKA dan telah disanggupi akan dilaksanakan melalui Perjanjian Kinerja.

b. Topik Pelaksanaan Anggaran Level 3

- (1) Selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional pemerintah daerah serta pelaporannya.
- (2) Dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan dengan dibuatnya Laporan Realisasi Anggaran per triwulanan serta Laporan Realisasi Anggaran dan Analisis Penggunaan Anggaran.
- (3) Dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien, dan ekonomis.
- (4) Menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*) dan penghematan biaya (*cost saving*).
- (5) Dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

c. Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP Level 3

- (1) Perjanjian Kinerja Pejabat Inspektorat Daerah Kota Tarakan telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP.
- (2) Perjanjian Kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan.



- (3) Sistem pengukuran kinerja pada Inspektorat Kota Tarakan telah digunakan untuk mengukur Kinerja pada level organisasi APIP, Kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT), dan Dipantau secara berkala.

d. Topik Pelaporan Manajemen APIP Level 3

- (1) Laporan akuntabilitas Inspektorat Kota Tarakan kepada manajemen pemerintah daerah telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.
- (2) Laporan akuntabilitas Inspektorat Kota Tarakan kepada manajemen pemerintah daerah telah menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala.

4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

a. Topik Pengelolaan Komunikasi Intern Level 3

- (1) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan serta telah memiliki pedoman atas pengawasan dan kendali mutu.
- (2) Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspose hasil pengawasan dan diskusi rencana pemerintah daerah, informasi penting dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan.
- (3) Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern dan hubungan komunikasi internal Inspektorat Kota Tarakan telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.



b. Topik Hubungan APIP dengan Manajemen Level 3

- (1) Berpartisipasi dalam forum pemerintah daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
- (2) Berpartisipasi dalam komite organisasi strategis, yaitu dalam Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kota Tarakan sebagai pelaksana penjaminan kualitas.

c. Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Level 3

- (1) Mengidentifikasi area pengawasan berupa perencanaan, informasi, dan hasil yang akan dibagikan kepada pihak lain, yaitu dalam rangka mengikuti Kegiatan Rakornas Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Kalimantan Utara serta memberikan Laporan Rakorwasda tahun 2022.
- (2) Melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan stakeholder dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.

5. Elemen Struktur Tata Kelola

a. Topik Mekanisme Pendanaan Level 3

- (1) Alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pengawasan intern (*assurance* dan *consulting services*).
- (2) Alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan telah disahkannya RKA dan DPA TA 2023.



b. Topik Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM Level 3

- (1) Melakukan penugasan pengawasan dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM perangkat daerah secara penuh tanpa pembatasan atau intervensi.
- (2) Melakukan penugasan pengawasan tidak terdapat pembatasan akses.
- (3) Melakukan penugasan pengawasan tidak terdapat intervensi oleh pimpinan daerah.

c. Topik Hubungan Pelaporan Level 3

Menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada pimpinan daerah yaitu berupa ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 yang memuat informasi penugasan yang telah terealisasi, jumlah temuan dan rekomendasi, serta permasalahan dan langkah penyelesaian masalah.

6. Elemen Peran Layanan

a. Topik Audit Ketaatan Level 3

- (1) Perencanaan Audit Ketaatan Inspektorat Kota Tarakan telah dikomunikasikan kepada *stakeholder/auditee* dengan dilakukannya penyampaian Surat Tugas perihal Audit Ketaatan, Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dengan dilakukannya rapat dengan *auditee*, Menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI), Mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit, dan Mengembangkan program kerja audit yang terdapat pada Program Kerja Audit Ketaatan.
- (2) Pelaksanaan Audit Ketaatan telah Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit ketaatan, Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA), Mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh yang telah dituangkan dalam kertas kerja audit ketaatan, Mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan



peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan yang telah dituangkan dalam kertas kerja audit ketaatan, Melalui supervisi dan reviu berjenjang yang terdapat pada kendali mutu, program kerja audit, kertas kerja audit dan *routing slip* pelaporan audit ketaatan, dan Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi yang tertuang dalam notisi temuan hasil pemeriksaan ketaatan.

- (3) Hasil Audit Ketaatan telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan notisi hasil audit yang disertai dengan tanggapan oleh auditi terkait kesepakatan tindak lanjut, dan Didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

b. Topik Audit Kinerja

- (1) Perencanaan audit kinerja telah Dikomunikasikan kepada stakeholder/auditi dengan dilakukan penyampaian Surat Tugas, Mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit dengan dilakukan survei pendahuluan, Mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit terhadap register risiko yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Tarakan, dan Menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati serta Mengembangkan program kerja audit.
- (2) Pelaksanaan Audit Kinerja Inspektorat Kota Tarakan telah Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja, Mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian yang tertuang dalam kertas kerja audit, Mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut yang tertuang dalam kertas kerja



audit, Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam kertas kerja audit, Melalui supervisi dan reviu berjenjang, dan Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi atas dasar kertas kerja audit dan dituangkan dalam notisi hasil audit/Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) tim pemeriksa.

- (3) Hasil audit kinerja Inspektorat Kota Tarakan telah Dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui Laporan Hasil Audit Kinerja, dan Didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

c. Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D Level 3

- (1) Persiapan *assurance* Inspektorat Kota Tarakan atas *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) telah Mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi, dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait *assurance* atas GRC, dan Mengidentifikasi objek *assurance* yang terdapat pada program kerja.
- (2) Pelaksanaan *assurance* Inspektorat Kota Tarakan atas GRC telah dikomunikasikan kepada *stakeholder* dengan disampaikannya Surat Tugas kegiatan pengawasan kepada pimpinan unit kerja/PD.
- (3) Hasil *assurance* atas GRC telah Dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan TA 2022, Laporan Hasil Kompilasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 serta Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022, dan Didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil *assurance* serta bukti pelaksanaan tindak lanjut dengan dibuatnya progres perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP.



d. Topik Jasa Konsultansi

- (1) Memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi berupa sosialisasi.
- (2) Hasil jasa konsultansi telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui laporan hasil jasa konsultansi semesteran yang ditujukan kepada Wali Kota Tarakan.
- (3) Melaporkan kepada pimpinan daerah bila ada hasil dari kegiatan jasa konsultansi yang memiliki risiko (sifat dan materialnya) yang signifikan terhadap organisasi.

Selain hal-hal diatas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*), sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan layanan APIP, baik berupa *assurance* maupun *consulting*.
2. Mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan *update* secara berkala atas seluruh risiko strategis melalui kegiatan manajemen risiko.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas seluruh risiko strategis perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tarakan telah berada pada “**Level 3**” dengan **skor “3,000”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

- 1. Persentase Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**
- 2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti**
- 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti**

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Tarakan melakukan beberapa pencapaian yang antara lain adalah adanya Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti, dan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti.

Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dilaksanakan oleh Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada Inspektorat Kota Tarakan.

4. Indikator Kinerja Utama 4

Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-XI/563/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-III/159/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023, Inspektur Kota Tarakan memiliki tugas pengawasan sebanyak 23 area pengawasan dari 13 jenis pengawasan yang disusun. Berikut tabel rincian dan rekapitulasi pengawasan yang disusun pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) :



Tabel 3.10
Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) yang Dilaksanakan Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Jumlah Laporan
1	Reviu PBJ oleh APIP	Reviu	4 LHR
2	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu & Tugas Pendampingan ke BPK RI	1 LHR
3	Reviu DAK oleh APIP	Reviu	4 LHR
4	Reviu LPPD oleh APIP	Reviu	1 LHR
5	Audit Dana BOS	Audit Ketaatan/Operasional	21 LHP
6	Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas dengan Sasaran Memberikan Keyakinan Bahwa Target Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan Kas Daerah Telah Sesuai dengan Perencanaan	Monitoring/Evaluasi/Reviu	10 LAP
7	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Audit Kinerja/Probity/ Evaluasi/Reviu	13 LAP
8	Evaluasi Internal Zona Integritas	Evaluasi, Asistensi dan Pendampingan	3 LHE
9	Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	Asistensi, Pendampingan dan Evaluasi	1 LHE
10	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	6 LHE
11	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Evaluasi	30 LHE
12	Peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi Mandiri	1 LHE
13	Perangkat Daerah Terkait	Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi	3 LHE
14	Reviu Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RKA SKPD)	Reviu	2 LHR
15	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi	2 LHE
16	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan Sasaran Kasus Kerugian Negara yang Dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum	Join Audit/Audit Dengan Tujuan Tertentu	3 LAP
17	Penanganan Kasus Pengaduan/ Permintaan di Lingkungan Pemda	Audit Dengan Tujuan Tertentu	7 LHP
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Audit Kinerja	1 LHP
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Audit PBJ	1 LHP
20	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Audit Kinerja	1 LHP
21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Audit Ketaatan/Operasional	1 LHP
22	Upaya Penanganan Gratifikasi	Sosialisasi	1 LAP
23	Layanan Jasa Advise	Sosialisasi/Workshop/ Coaching Klinik	1 LHE
TOTAL			118 LAP

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah yaitu Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Pengawasan PKPT yang Terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Pengawasan PKPT}} \times 100\%$$

$$\frac{23 \text{ Pengawasan PKPT yang Terlaksana}}{23 \text{ Kegiatan Pengawasan PKPT}} \times 100\% = 100,00\%$$



Pelaksanaan Monev Kas dan Stok Opname di Puskesmas Mamburungan



Pengembalian Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT)

5. Indikator Kinerja Utama 5

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Selesai Ditindaklanjuti

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat Kota Tarakan juga melakukan monitoring pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan, Inspektur Kota Tarakan memiliki tugas monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berikut tabel rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 :



Tabel 3.11
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2023

No	Tahun	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				
		Temuan Pemeriksaan/ Rekomendasi	Selesai/ Sesuai	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2007	450	447	3	-	-
2	2008	476	439	37	-	-
3	2009	554	516	38	-	-
4	2010	436	416	20	-	-
5	2011	461	426	35	-	-
6	2012	416	364	52	-	-
7	2013	305	273	32	-	-
8	2014	277	223	54	-	-
9	2015	257	188	69	-	-
10	2016	178	138	40	-	-
11	2017	113	93	20	-	-
12	2018	115	85	30	-	-
13	2019	64	49	15	-	-
14	2020	45	42	3	-	-
15	2021	185	158	27	-	-
16	2022	106	100	6	-	-
Total		4.438	3.957	481	-	-
Persentase TL Temuan Hasil Pemeriksaan APIP			89,16%	10,84%	-	-

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



**Sidang Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah**



**Pengembalian Jaminan Tindak
Lanjut Kerugian Daerah**



Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah yaitu Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Selesai Ditindaklanjuti di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan Hasil Pemeriksaan APIP}} \times 100\%$$

$$\frac{3.957 \text{ Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti}}{4.438 \text{ Temuan Hasil Pemeriksaan APIP}} \times 100\% = 89,16\%$$

6. Indikator Kinerja Utama 6

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti

Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2004, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. BPK RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Kota Tarakan dan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Inspektorat Kota Tarakan melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan hasil pemeriksaan BPK RI. Berikut tabel perkembangan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada Provinsi Kalimantan Utara (s.d Semester II 2023) :



Tabel 3.12
Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
pada Provinsi Kalimantan Utara (s.d Semester II 2023)

Pemerintah Daerah	Temuan	Rekomendasi	Sistem Pemantauan Tindak Lanjut				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dlm Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
Kabupaten Nunukan	402	954	847	91	-	16	88,78%
Kota Tarakan	429	944	826	117	-	1	87,50%
Kabupaten Bulungan	417	978	882	71	-	25	90,18%
Kabupaten Malinau	329	731	646	85	-	0	88,37%
Kabupaten Tana Tidung	263	609	537	70	-	2	88,18%
Provinsi Kalimantan Utara	235	550	453	97	-	0	82,36%

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, 2023



Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti di tahun 2023, maka Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

Nilai Capaian : Persentase Hasil Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Kota Tarakan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPK RI

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti = 87,50%



Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti, dan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Keempat (2023)

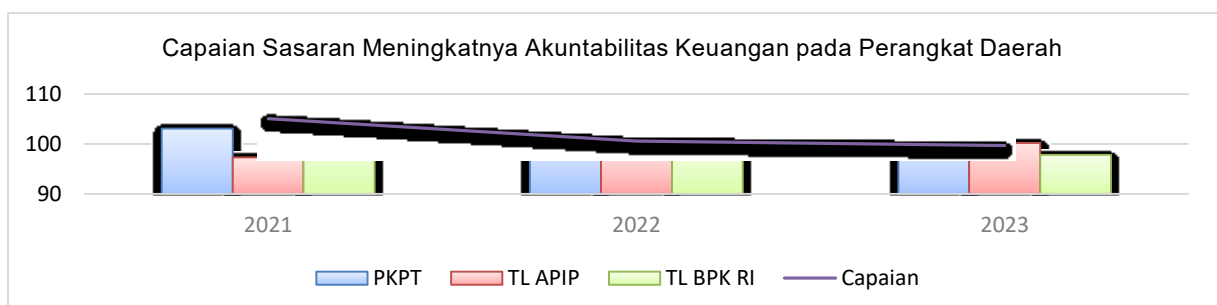
Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun (%)		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir RPJMD (%)
	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)			
Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai PKPT	103,09	102,04	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yg Ditindaklanjuti	97,26	98,95	89,00	89,16	100,18	90,00	89,16
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yg Selesai Ditindaklanjuti*	103,13	100,70	89,50	87,50	97,77	90,00	87,50
Rata-Rata Capaian Kinerja	105,05	100,56			99,65		

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023 * BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai 99,65% dengan kategori Sangat Tinggi terjadi penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 100,56% dengan kategori Sangat Tinggi yang menurun lagi dari tahun 2021 yang mencapai 105,05% dengan kategori Sangat Tinggi.

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.14
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023





Hal ini disebabkan karena indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti mengalami penurunan berdasarkan laporan hasil pemantauan kerugian daerah dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Ada beberapa temuan dan rekomendasi belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut. Temuan dan rekomendasi tersebut biasanya berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangan di level legislatif sehingga memerlukan waktu untuk penerbitannya. Ada juga beberapa rekomendasi pengembalian kerugian daerah dengan nominal besar yang pengembaliannya memerlukan waktu untuk dilunasi.

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti Pengawasan adalah indikator yang bersifat output. Sehingga realisasinya terbilang memenuhi hingga melebihi target.

Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) dan Pemantauan Pemulihan Kerugian Daerah oleh BPK RI Semester II TA 2023





SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Tarakan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.



Pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 sebagai fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan sesuai Standar Evaluasi AKIP. Berikut tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 :

Tabel 3.15
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pada Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi	Predikat
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	75,40	BB
2	Sekretariat DPRD (SETWAN)	71,83	BB
3	Inspektorat (INSP)	83,77	A
4	Dinas Pendidikan (DISDIK)	81,47	A
5	Dinas Kesehatan (DINKES)	84,42	A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR)	81,85	A
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP)	79,91	BB
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DINSOSPM)	63,84	B
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)	77,79	BB
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	72,05	BB
11	Dinas Perikanan (DISKAN)	66,51	B
12	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	75,90	BB
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	78,31	BB
14	Dinas Perhubungan (DISHUB)	60,35	B
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)	71,03	BB
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	86,03	A
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSPAN)	74,22	BB
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DISBUDPORAPAR)	75,93	BB
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP)	69,68	B



No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi	Predikat
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK)	78,24	BB
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP DAN PMK)	65,15	B
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	77,50	BB
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)	68,53	B
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	71,75	BB
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)	60,15	B
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	65,24	B
27	Kecamatan Tarakan Timur (CTT)	68,65	B
28	Kecamatan Tarakan Barat (CTB)	74,97	BB
29	Kecamatan Tarakan Tengah (CTG)	71,99	BB
30	Kecamatan Tarakan Utara (CTU)	63,60	B

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{PD Kriteria "Baik" (Predikat B/BB/A) dalam Evaluasi AKIP}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ PD Kriteria "Baik" (Predikat B/BB/A) dalam Evaluasi AKIP}}{30 \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\% = 100,00\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 3 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria "Baik" dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :



Tabel 3.16
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun Keempat (2023)

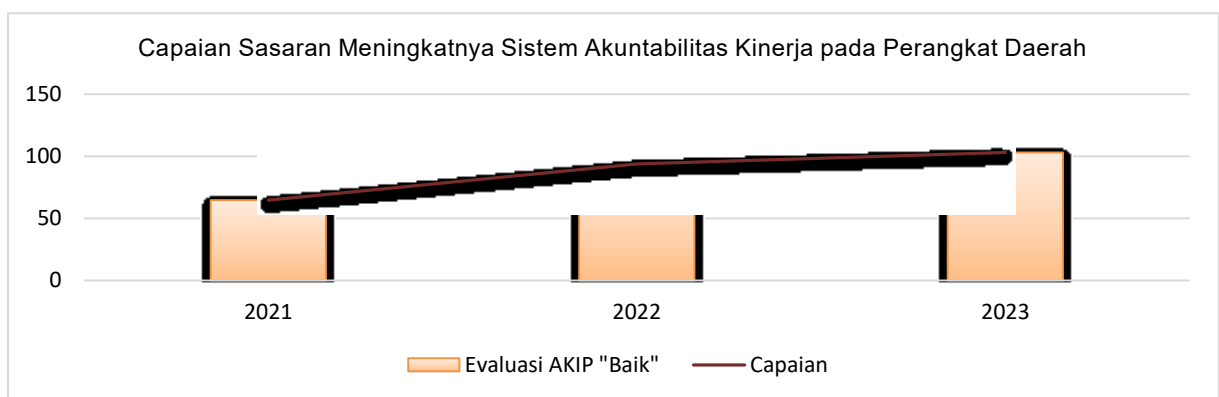
Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun (%)		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir RPJMD (%)
	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)			
Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi AKIP*	64,51	93,75	97,00	100,00	103,09	98,00	100,00

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023 *Menpan RB, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai 103,09% dengan kategori Sangat Tinggi mengalami kenaikan dari capaian tahun 2022 yaitu 93,75% dengan kategori Sangat Tinggi dan tahun 2021 yang hanya mencapai 64,51% dengan kategori Rendah.

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2023



Hal ini disebabkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan terhadap 30 Perangkat Daerah seluruhnya memenuhi kriteria “Baik”. Perangkat Daerah kriteria “Baik” terdiri dari 10 perangkat daerah dengan predikat “B” sebanyak 33,33%, 16 PD predikat “BB” sebanyak 50,00% dan 4 PD predikat “A” sebanyak 16,67%.



Adapun yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah adalah telah dilaksanakannya pendampingan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah oleh Tim SAKIP Kota Tarakan (Bagian Organisasi Setda, Bappedalitbang, Inspektorat) secara baik dan terus menerus.



Sosialisasi Pelaksanaan
Evaluasi AKIP



SK Pedoman Evaluasi AKIP

Faktor-faktor lainnya sebagai pendukung keberhasilan perangkat daerah dalam penilaian evaluasi SAKIP adalah :

1. Sebagian perangkat daerah telah menetapkan ukuran keberhasilan (indikator) terhadap tujuan organisasi pada dokumen Renstra.
2. Sebagian perangkat daerah telah melakukan publikasi dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui website resmi masing-masing OPD atau melalui website resmi Pemerintah Kota Tarakan atau media lain yang memudahkan publik/masyarakat yang mengakses).
3. Sebagian perangkat daerah telah melakukan evaluasi internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah.



4. Sebagian perangkat daerah telah melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.
5. Sebagian perangkat daerah telah andal dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya pada dokumen LKIP, seperti terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

Berdasarkan hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) di masing-masing perangkat daerah yang telah dilakukan secara pragmatis, telah ditemukan beberapa kelemahan umum pada sebagian perangkat daerah dan direkomendasikan sebagai berikut :

1. Agar perangkat daerah menetapkan ukuran keberhasilan (indikator) terhadap tujuan organisasi pada dokumen Renstra.
2. Agar perangkat daerah melakukan publikasi dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui website resmi masing-masing OPD atau melalui website resmi Pemerintah Kota Tarakan atau media lain yang memudahkan publik/masyarakat yang mengakses).
3. Agar perangkat daerah melakukan evaluasi internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah.
4. Agar perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.
5. Agar perangkat daerah andal dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya pada dokumen LKIP, seperti terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.



SASARAN STRATEGIS 4 :

Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik didalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Tujuan manajemen risiko meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manfaat manajemen risiko sebagai masukan dalam perbaikan



perencanaan dan efektivitas kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Manfaat penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu hasil penilaian dapat mengidentifikasi *Area of Improvement* untuk perbaikan pengendalian kedepannya dan maturitas SPIP (yang didalamnya termasuk skor MRI) merupakan salah satu komponen penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), *Monitoring Center For Prevention* atau MCP KPK, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK WBBM. Penerapan Manajemen Risiko dinilai setiap tahun melalui penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang diintegrasikan dengan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Inspektorat sebagai unit pengawas risiko bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait peneraparan pengelolaan risiko. Untuk menghitung Manajemen Risiko Indeks (MRI) di tahun 2023, maka Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

Nilai Capaian : Skor Manajemen Risiko Indeks

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dikeluarkan oleh BPKP

Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) = 2,972

Pada tahun 2023 Inspektorat telah melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPIP yang dilakukan perangkat daerah. Dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan Inspektorat , BPKP Perwakilan Kalimantan Utara melakukan panel dengan BPKP Pusat. Dari hasil panel yang dilakukan tingkat pusat didapatkan hasil yaitu : Nilai Maturitas SPIP-T Level 3, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 2 dan Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Level 2.



Penetapan hasil evaluasi penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta Timur sbb :

Tabel 3.18
Penetapan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Manajemen Risiko Indeks	
		Skor	Level
Provinsi Kalimantan Utara			
1	Kabupaten Nunukan	2,980	2
2	Kabupaten Malinau	2,860	2
3	Kota Tarakan	2,972	2
4	Kabupaten Bulungan	3,340	3
5	Kabupaten Tana Tidung	3,150	3

Sumber : BPKP Jakarta Timur 2023

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 4 Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan indikator kinerja Manajemen Risiko Indeks (MRI), maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian internal Pemerintah Tahun Keempat (2023)

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun (%)		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir RPJMD (%)
	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)			
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	100,00	96,77	3,20	2,97	92,81	3,30	2,97

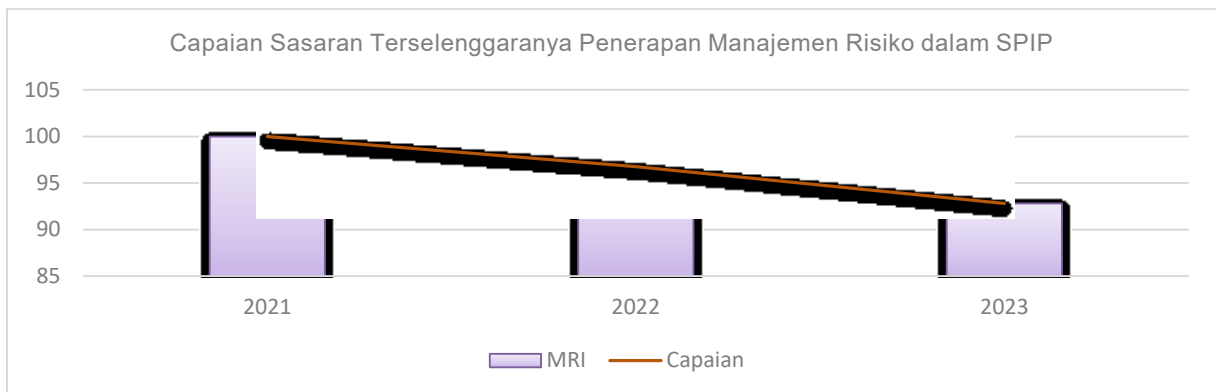
Sumber : BPKP Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tercapai 92,81% dengan kategori Sangat Tinggi menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 96,77% dengan kategori Sangat Tinggi di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 mencapai 100,00% dengan kategori Sangat Tinggi.



Berikut diagram capaian sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun 2023 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.20
Capaian Sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2021 s/d 2023



Capaian sasaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan area perencanaan komponen MRI pada kualitas perencanaan mengalami penurunan antara lain (1) Kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis belum semuanya berorientasi outcome; (2) Sasaran strategis pemerintah daerah/perangkat daerah, sasaran program maupun sasaran kegiatan belum semuanya didukung indikator kinerja dan target yang tepat; dan (3) *conformity* nilai SAKIP “B”.

Rencana aksi Manajemen Risiko Indeks (MRI) berdasarkan hasil penilaian atas Area/Komponen Manajemen Risiko Indeks Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perencanaan

✓ Kualitas Perencanaan

- 1) Peningkatan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis yang berorientasi outcome;
- 2) Peningkatan kualitas sasaran strategis pemerintah daerah/perangkat daerah, sasaran program maupun sasaran kegiatan belum semuanya yang didukung indikator kinerja dan target yang tepat;
- 3) Peningkatan nilai SAKIP.



2. Kapabilitas

- ✓ Kepemimpinan, Membangun infrastruktur anti korupsi diantaranya penetapan perencanaan dan implementasi program/kegiatan pembelajaran *fraud* yang dilengkapi dengan jadwal, personil yang memadai secara berkala.
- ✓ Kebijakan Manajemen Risiko
 - 1) Percepatan penetapan Peraturan Wali Kota Pengendalian *Fraud*;
 - 2) Implementasi pengelolaan risiko *fraud* atas kegiatan-kegiatan utama yang berlangsung di unit/perangkat daerah.

3. Hasil

- ✓ Aktivitas Penanganan Risiko
 - 1) Implementasi manajemen risiko yang melekat pada proses bisnis instansi pemerintah;
 - 2) Penilaian efektivitas atas tindak pengendalian risiko.

Penetapan hasil evaluasi penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2022-2023 oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Penetapan Hasil Evaluasi atas Manajemen Risiko Indeks Tahun 2022-2023

Area/Komponen MRI	Evaluasi Tahun 2022			Evaluasi Tahun 2023			Penurunan/ Kenaikan
	Bobot Unsur	Skor	Nilai	Bobot Unsur	Skor	Nilai	
PERENCANAAN	40,00%		1,400	40,00%		1,200	-0,200
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,500	1,400	40,00%	3,000	1,200	-0,200
KAPABILITAS	25,00%		0,857	25,00%		0,919	0,062
Kepemimpinan	5,00%	2,875	0,144	5,00%	3,000	0,150	0,006
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150	5,00%	3,000	0,150	0,000
Sumber Daya Manusia	5,00%	3,000	0,150	5,00%	3,000	0,150	0,000
Kemitraan	2,50%	3,000	0,075	2,50%	3,000	0,075	0,000
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,704	0,338	12,50%	3,150	0,394	0,056
HASIL	30,00%		0,783	30,00%		0,853	0,070
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,375	0,445	18,75%	2,750	0,516	0,070
Outcomes	11,25%	3,000	0,338	11,25%	3,000	0,338	0,000
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)			3.040			2,972	-0,068

Sumber : BPKP, 2023



Evaluasi RTP Perumda
RTP Tirta Alam Tarakan



Penyiapan Eviden MRI dengan
BPKP

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.7 sebagai berikut :



Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dlm PKPT	102,04	-	-	-	Efisien
		Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	103,09	233.094.600	193.183.737	82,88	Efisien
		Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	100,00	-	-	-	Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pengawasan Sesuai PKPT	101,01	1.068.295.200	909.846.000	85,17	Efisien
		Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	100,18	138.737.500	108.625.000	78,29	Efisien
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yg Selesai Ditindaklanjuti	97,77				Efisien
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada PD	Persentase Perangkat Daerah Dengan Kriteria “Baik” dlm Evaluasi SAKIP	103,09	147.560.000	147.435.000	99,92	Efisien
4	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	92,81	191.348.990	165.695.000	86,59	Efisien
Total Capaian			99,99	1.779.036.290	1.524.784.737	85,71	Efisien

Sumber : Inspektorat, 2023

Dari tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sebesar 86,57% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Inspektorat sebesar 99,99% dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat 8 (delapan) indikator sasaran yang seluruhnya dengan kategori “Efisien”.

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam dokumen pengesahan anggaran Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.33
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2023

a. Program Prioritas

NO	SASARAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2023		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah				
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
	✓ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan	233.094.600	193.183.737	82,88
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					82,88
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda	545.700.000	446.475.000	81,82
	✓ Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Lap Keu	345.270.000	310.832.500	90,03
	✓ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.750.000	80.125.000	81,97
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
	✓ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yg Ditangani	40.987.500	28.500.000	69,53
	✓ Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	177.325.200	152.538.500	86,02
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					81,88
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja PD	55.420.000	55.370.000	99,91
	✓ Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Lap Hasil Reviu Lap Kinerja	92.140.000	92.065.000	99,92
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					99,92
4	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	✓ Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	150.038.990	124.445.000	82,94
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
	✓ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bid Pengawasan yg Disusun	41.310.000	41.250.000	99,85
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					91,40
Total Target dan Capaian Anggaran Program Prioritas			1.779.036.290	1.524.784.737	85,71

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Dari Anggaran Prioritas, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar Rp.1.779.036.290,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.524.784.737,- sehingga rata-rata capaian serapan anggaran Program Prioritas adalah 85,71%.

Berikut realisasi keuangan sasaran strategis (Program Pendukung) Inspektorat



Tahun 2023 pada tabel dibawah ini :

b. Program Pendukung

NO	SASARAN / PROGRAM /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2023		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.446.825	4.628.007.367	
	✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.536.000	51.476.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	11.200.000	11.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.054.420	6.040.000	
	✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	107.995.000	100.265.000	
	✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44.997.200	40.550.900	
	✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14.999.680	14.571.325	
	✓ Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	19.990.000	
	✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	126.644.600	97.659.167	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000	4.000.000	
	✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	70.000.000	51.925.855	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.500.000	1.062.600	
	✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65.000.000	61.310.050	
	✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32.336.500	21.305.000	
	✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	199.980.000	198.00.000	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi				
	✓ Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jml PD yg Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	9.112.660	3.100.000	
	✓ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	139.999.660	97.618.283	
	✓ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35.327.190	34.698.706	
	✓ Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.230.000	10.200.000	
Total Anggaran Program Pendukung			5.593.659.735	5.352.982.253	95,00

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaan besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah lebih kecil untuk anggaran prioritas, dan hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.34
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan
Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	1.779.036.290,00	1.524.784.737,00	85,71
2	Pendukung	5.593.659.735,00	5.352.982.253,00	95,00
Total Capaian		7.372.696.025,00	6.877.766.990,00	93,29

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Inspektorat, 2023

2. Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Inspektorat Kota Tarakan yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2023, disajikan dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan Anggaran

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2021	5.582.794.778,00	5.274.158.627,00	308.636.151,00	5,53
2	2022	7.327.897.152,00	6.495.281.809,00	832.615.343,00	11,36
3	2023	7.372.696.025,00	6.877.766.990,00	494.929.035,00	6,71

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Inspektorat, 2023

Selanjutnya Laporan Konsolidasi Pembangunan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 seperti tabel dibawah ini :



TABEL 3.36
LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

Inspektorat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	7.372.696.025,00	100,00	97,73	93,24	6.874.115.115,00	498.580.910,00
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.388.990.225,00	100,00	99,64	96,63	5.207.213.264,00	181.776.961,00
6.01.01.2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.683.982.825,00	100,00	99,94	97,77	4.579.483.367,00	104.499.458,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.446.825,00	100,00	100,00	97,81	4.528.007.367,00	101.439.458,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.536.000,00	100,00	94,39	94,39	51.476.000,00	3.060.000,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000,00	100,00	100,00	100,00	11.200.000,00	0,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000,00	100,00	100,00	100,00	11.200.000,00	0,00
6.01.01.2.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.690.900,00	100,00	97,78	86,98	278.926.392,00	41.764.508,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.054.420,00	100,00	100,00	99,76	6.040.000,00	14.420,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.995.000,00	100,00	100,00	92,84	100.265.000,00	7.730.000,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.997.200,00	100,00	99,83	90,12	40.550.900,00	4.446.300,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.680,00	100,00	100,00	97,14	14.571.325,00	428.355,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	100,00	175,00	99,95	19.990.000,00	10.000,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.644.600,00	100,00	82,60	76,99	97.509.167,00	29.135.433,00
6.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.300.000,00	100,00	99,60	75,27	55.925.855,00	18.374.145,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000,00	100,00	93,02	93,02	4.000.000,00	300.000,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	100,00	100,00	74,18	51.925.855,00	18.074.145,00
6.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.816.500,00	100,00	97,03	94,26	281.677.650,00	17.138.850,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000,00	100,00	75,00	70,84	1.062.600,00	437.400,00



6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	100,00	98,24	94,32	61.310.050,00	3.689.950,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.336.500,00	100,00	77,22	65,89	21.305.000,00	11.031.500,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.980.000,00	100,00	100,00	99,01	198.000.000,00	1.980.000,00
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.504.631.690,00	100,00	93,99	85,52	1.286.749.125,00	217.882.565,00
6.01.02.2.01.0	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.286.318.990,00	100,00	94,66	86,00	1.106.252.500,00	180.066.490,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55.420.000,00	100,00	100,00	99,91	55.370.000,00	50.000,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	545.700.000,00	100,00	93,18	81,26	443.415.000,00	102.285.000,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	92.140.000,00	100,00	100,00	99,92	92.065.000,00	75.000,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	345.270.000,00	100,00	97,44	90,03	310.832.500,00	34.437.500,00
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	150.038.990,00	100,00	90,80	82,94	124.445.000,00	25.593.990,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.750.000,00	100,00	90,96	81,97	80.125.000,00	17.625.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218.312.700,00	100,00	90,03	82,68	180.496.625,00	37.816.075,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	40.987.500,00	100,00	77,95	69,53	28.500.000,00	12.487.500,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	177.325.200,00	100,00	92,83	85,72	151.996.625,00	25.328.575,00
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	479.074.110,00	100,00	87,98	79,35	380.152.726,00	98.921.384,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	274.404.600,00	100,00	99,46	85,43	234.435.737,00	39.968.863,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	41.310.000,00	100,00	100,00	99,85	41.250.000,00	60.000,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	233.094.600,00	100,00	99,37	82,88	193.185.737,00	39.908.863,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	204.669.510,00	100,00	72,58	71,20	145.716.989,00	58.952.521,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.112.660,00	100,00	34,02	34,02	3.100.000,00	6.012.660,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	139.999.660,00	100,00	71,73	69,80	97.718.283,00	42.281.377,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35.327.190,00	100,00	98,56	98,22	34.698.706,00	628.484,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20.230.000,00	100,00	50,42	50,42	10.200.000,00	10.030.000,00

Sumber : Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan/Bagian Pembangunan Setda, 2023



D. Penghargaan yang Diterima Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023

Untuk tahun 2023 Inspektorat Kota Tarakan tidak memperoleh penghargaan baik dari kota, provinsi maupun nasional.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kota Tarakan atas Perjanjian Kinerja(PK) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 yang terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 8 (delapan) indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Rata-rata capaian indikator Inspektorat Kota Tarakan sebesar 99,99% dengan kategori "*Sangat Tinggi*" (ST);
- b) Capaian indikator kinerja Inspektorat Kota Tarakan terdapat 8 (delapan) indikator sasaran dengan capaian kinerja $90 \geq 100$ % kategori "*Sangat Tinggi*" atau 100%;
- c) Rata-rata capaian serapan anggaran Inspektorat Kota Tarakan Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar 93,29% dengan 8 (delapan) indikator sasaran dengan kategori "*Efisien*"

B. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan angka capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023, rata-rata kategori capaian kinerjanya adalah "Sangat Tinggi" yang di capai 8 (delapan) indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase SOP untuk setiap jenis kegiatan pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan capaian kinerja sebesar 102,04%;
2. Persentase Auditor dan APIP yang bersertifikat pengawasan, dengan capaian kinerja sebesar 103,09%;
3. Level pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan capaian kinerja sebesar 100,00%;
4. Persentase realisasi pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan capaian kinerja sebesar 101,01%;



5. Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100,18%;
6. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 97,77%
7. Persentase perangkat daerah dengan kriteria “Baik” dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan capaian kinerja sebesar 103,09%;
8. Manajemen Risiko Indeks (MRI), dengan capaian kinerja sebesar 92,81%.

Faktor pendukung pencapaian kategori “Sangat Tinggi” ini antara lain :

1. Dukungan anggaran pembangunan dan belanja daerah yang memenuhi untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Penentuan target capaian yang melihat trend capaian tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai perhitungan yang cermat;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk bekerja dan berkinerja dengan baik;
4. Komitmen pimpinan dan ASN Inspektorat Kota Tarakan yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi.

Ada beberapa hal yang perlu dan sebagian sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi evaluasi AKIP 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kota Tarakan, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan revisi Pohon Kinerja Inspektorat Kota Tarakan yang masih mengaitkan dengan struktur perencanaan, belum berbicara kerangka logis kinerja;
2. Melakukan revisi tujuan strategis yang relevan dengan tugas/fungsi atau mandat dari Inspektorat Daerah;



3. Melakukan revisi indikator kinerja yang SMART dan relevan dengan sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2024 dan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026;
4. Melengkapi definisi operasional pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat;
5. Melakukan revisi capaian kinerja yang sudah 100% dan yang bersifat output pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara lain (1) Persentase SOP untuk setiap jenis kegiatan pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); (2) Persentase Auditor dan APIP yang bersertifikat pengawasan; (3) Persentase realisasi pengawasn sesuai PKPT; (4) Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti; (5) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti.
6. Melakukan analisis capaian kinerja yang memadai;
7. Melakukan dan menyiapkan data perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional/daerah lain;
8. Melakukan penambahan capaian indikator Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kota Tarakan pada umumnya, Aamiin. Terima Kasih.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121
Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Inspektorat , terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan oleh Inspektorat Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Februari 2024

Inspektur,



Abd. Azis Hasan, A.P, M.H.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19750212 199501 1 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jalan Sulawesi, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kaltara 77113
Telp. (0551) 21072-21859 Fax 21859, Pos El : bawas@tarakankota.go.id
Laman : <http://inspektorat.tarakankota.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Abd. Azis Hasan, A.P., M.H.**

Jabatan : Inspektur Kota Tarakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **dr. H. Khairul, M.Kes.**

Jabatan : Walikota

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Wali Kota Tarakan

dr. H. KHAIRUL, M.Kes.

Pihak Pertama
Inspektur,

ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750212 199501 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
INSPEKTUR

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (KAPIP)	1	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (KAPIP)	3,3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah	1	Persentase PD dengan kriteria minimal "Baik" dalam evaluasi AKIP	98 %
3.	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko (MR) dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,30
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	1	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	70/B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.884.613.990,-	APBD
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	534.993.200,-	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.439.365.496,-	APBD
Total DPA Tahun 2024	7.858.972.686,-	

Tarakan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Wali Kota Tarakan

dr. H. KHAIRUL, M.Kes.

Pihak Pertama,
Inspektur,

ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jalan Sulawesi RT 01, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kaltara 77113
Laman : <http://inspektorat.tarakankota.go.id> Pos-el : bawas@tarakankota.go.id

Tarakan, 12 Januari 2024

Nomor : 900.1.15.5/047/Inspektorat
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pelaporan Kapabilitas APIP 2023**

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Tarakan**
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
di
Tarakan

Sehubungan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa Tingkat Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Tarakan Tahun 2023 **"Level 3"** berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur,



ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIP LEVEL 3
INSPEKTORAT DAERAH KOTA TARAKAN**

NOMOR : PE.09.03/LHP- 356/PW34/6/2023
TANGGAL : 27 OKTOBER 2023



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Yos Sudarso No.34 Tarakan 77112
Telepon: (0551) 22855, 3806421; Faksimile: (0551) 22855
E-mail: kaltara@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

27 Oktober 2023

Nomor : PE.09.03/LHP- 356/PW34/6/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat
Daerah Kota Tarakan

Yth. Walikota Tarakan

di Tarakan

Sehubungan dengan upaya menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Tarakan, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.
4. Surat Inspektur Daerah Kota Tarakan Nomor 700/901/Inspektorat tanggal 1 Agustus 2023 hal Permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.09.02/ST-392/PW34/6/2023 tanggal 3 Agustus 2023.



B. Tujuan Penugasan

Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja inspektorat.

C. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan dilaksanakan selama 15 hari kerja mulai tanggal 7 sampai dengan 28 Agustus 2023 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan.

D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tarakan dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tarakan atas 18 topik untuk periode penilaian tahun 2023.
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri.
3. Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan atas 18 topik untuk periode penilaian mandiri mulai dari Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi, serta wawancara dengan personil di lingkungan internal Inspektorat Daerah Kota Tarakan dan para *stakeholder* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.



F. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Tarakan dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No. dan Tanggal Surat Tugas	No. dan Tanggal Laporan
1.	Bimbingan Teknis Level 2	ST-069/PW34/6/2017 tanggal 20 April 2017	LBIN-060/PW34/6/2017 tanggal 23 Mei 2017
2.	Bimbingan Teknis Level 2	ST-144/PW34/6/2018 tanggal 20 April 2018	LBINAPIP- 082/PW34/6/2018 tanggal 7 Mei 2018
3.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-346/PW34/6/2018 tanggal 26 September 2018	LBINAPIP-213/PW34/6/2018 tanggal 10 Oktober 2018
4.	Penjaminan Kualitas Menuju Level 3	-	700/749/Inspektorat tanggal 1 November 2018
5.	QA Menuju Level 3	ST-418/PW34/6/2018 tanggal 9 November 2018	LQAPIP- 281/PW34/6/2018 tanggal 10 Desember 2018
6.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-024/PW34/6/2020 tanggal 20 Januari 2020	LBINAPIP-030/PW34/6/2020 tanggal 21 Februari 2020
7.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-225/PW34/6/2020 tanggal 6 Juli 2020	LBINAPIP-124/PW34/6/2020 tanggal 30 Juli 2020
8.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-349/PW34/6/2020 tanggal 2 September 2020	LBINAPIP-182/PW34/6/2020 tanggal 8 Oktober 2020
9.	Penjaminan Kualitas Level 3	700/959/Inspektorat Tanggal 2 November 2020	700/988/Inspektorat tanggal 11 November 2020
10.	QA Level 3	ST-506/PW34/6/2020 tanggal 13 November 2020	LQAPIP- 274/PW34/6/2020 tanggal 3 Desember 2020
11.	SP Deputi	S-244/D3/04/2021 tanggal 14 April 2021	Hasil Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tarakan
12.	Re-SA	700/LAP SA KAPIP-987/X/2021	27 Oktober 2021
13.	QA Level 3	ST-475/PW34/6/2021 tanggal 29 Oktober 2021	LQAPIP- 458/PW34/6/2021 tanggal 24 Desember 2021
14.	Surat Undangan Mengikuti Ekspos Mandiri	S-340/D3.04/2021 tanggal 20 November	Undangan Ekspos Mandiri atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
15.	Ekspos dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Ekspos tanggal 3 Desember 2021	Notula hasil rapat tanggal 3 Desember 2021
16.	SP Deputi	SP-897/D3/04/2021 tanggal 29 Desember 2021	Hasil Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tarakan



No.	Uraian	No. dan Tanggal Surat Tugas	No. dan Tanggal Laporan
17.	Bimbingan Teknis Level 3	PE.07.02/ST-79/PW34/6/2022 tanggal 7 Maret 2022	PE.07.03/LHP-58/PW34/6/2022 tanggal 25 Maret 2022
18.	Bimbingan Teknis Level 3	PE.07.02/ST-236/PW34/6/2022 tanggal 14 Juni 2022	PE.07.03/LHP-198/PW34/6/2022 tanggal 6 Juli 2022
19.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 oleh Inspektorat Kota Tarakan	Surat Tugas Inspektur Kota Tarakan Nomor 700/534/Inspektorat tanggal 20 Juni 2022	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Tarakan Nomor 700/606/Inspektorat tanggal 1 Juli 2022
20	Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 oleh Inspektorat Kota Tarakan	Surat Inspektur Tarakan Nomor 700/623/Inspektorat tanggal 6 Juli 2022	Surat Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri
21	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kota Tarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.09.02/ST-331/PW34/6/2022 tanggal 1 Agustus 2022.	PE.09.03/LHP-254/PW34/6/2022 tanggal 22 Agustus 2022
22	Surat Undangan Mengikuti Ekspos Panel Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	RT.02/UND-42/PW34/6/2022 tanggal 19 Agustus 2022	Undangan Ekspos Panel Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tarakan
23	Notula Ekspos Panel Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kota Tarakan dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara		Notula Hasil Ekspos Panel tanggal 20 Agustus 2022
24	Berita Acara Ekspos Panel Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kota Tarakan		Berita Acara Hasil Ekspos Panel tanggal 20 Agustus 2022
25	Permohonan Ekspos Panel atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kota Tarakan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	PE.09.03/S-630/PW34/6/2022 tanggal 22 Agustus 2022	Permohonan Ekspos Panel Jenjang II
26	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 oleh Inspektorat Kota Tarakan	Surat Tugas Inspektur Kota Tarakan Nomor 700/801.2/Inspektorat tanggal 1 Agustus 2023	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kota Tarakan Nomor 700/801.2/Inspektorat tanggal 1 Agustus 2023
27	Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 oleh Inspektorat Kota Tarakan	Surat Inspektur Tarakan Nomor 700/901/Inspektorat tanggal 1 Agustus 2023	Surat Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri



No.	Uraian	No. dan Tanggal Surat Tugas	No. dan Tanggal Laporan
28	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kota Tarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Nomor PE.09.02/ST-392/PW34/6/2023 tanggal 3 Agustus 2023.	PE.09.02/ST-392/PW34/6/2023 tanggal 3 Agustus 2023.

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kota Tarakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tarakan berada pada “**Level 3**” dengan **skor “3.000”** sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional		0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola		0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

G. Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Simpulan atas pemenuhan 18 topik yang telah terimplementasikan secara baik di 6 (enam) elemen kapabilitas APIP tersaji pada **Lampiran 1**.



H. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus-Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

1) Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Topik Perencanaan SDM

Pencapaian pada topik ini adalah, telah:

Level 1

- (1) Memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan, yaitu berupa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan serta SK Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
- (2) Memiliki kebijakan/panduan rekrutmen yang tertuang dalam SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Level 2

- (1) Memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan, dan penetapan hasil analisis jabatan, yaitu berupa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan serta SK Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Tarakan serta hasil analisis jabatan di lingkungan inspektorat.
- (2) Kebijakan/panduan rekrutmen mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan, yang terdapat pada SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.



konsultansi atas sosialisasi dan konsultasi terkait Pengelolaan retribusi sewa kantin sekolah pada Dinas Pendidikan.

- (e) Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara *due profesional care*, seperti Sepriyanto Kolo Andik,ST dengan sertifikat auditor muda Nomor SERT-9642/JFA-KT/03/XI/2018.
- (2) Hasil jasa konsultansi telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui laporan hasil jasa konsultansi semesteran yang ditujukan kepada Walikota Tarakan.
- (3) Melaporkan kepada pimpinan daerah bila ada hasil dari kegiatan jasa konsultansi yang memiliki risiko (sifat dan materialnya) yang signifikan terhadap organisasi, yaitu atas pemberian jasa konsultansi atas sosialisasi dan konsultasi terkait Pengelolaan retribusi sewa kantin sekolah pada Dinas Pendidikan.

Kualitas Pengawasan atas Jasa Konsultansi.

- (1) Pelaksanaan Jasa Konsultansi selama periode penilaian telah menghasilkan 11 saran/rekomendasi.
- (2) Menerbitkan 1 atensi kepada Kepala Daerah atas permasalahan strategis, yaitu atensi pemberian jasa konsultansi atas sosialisasi dan konsultasi terkait Pengelolaan retribusi sewa kantin sekolah pada Dinas Pendidikan.

I. Ringkasan *Area of Improvement (Aoi)*

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a) Elemen Praktik Profesional

Topik Perencanaan Pengawasan

Identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan, atau konsulting.



2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)

a. Elemen Peran dan Layanan

1) Topik Audit Ketaatan

Mendorong auditi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan atas audit ketaatan.

2) Topik Audit Kinerja

Mengupdate Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Tarakan untuk Tahun 2023 beserta dengan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan.

3) Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)

1. Mendorong *stakeholder* untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan atas Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*).

2. Mengupdate dokumen dokumen atas Kertas Kerja Riview LKPD, Evaluasi SAKIP dan Penilaian Mandiri RB beserta dengan Surat Tugasnya serta mengontrol atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah dilakukan.

4) Jasa Konsultansi

1. Mengupdate sertifikat sesuai kompetensi jasa advisory.

2. Mengupdate data mengenai surat tugas penetapan narasumber sosialisasi atas jasa konsultasi yang diberikan.

J. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Kota Tarakan memiliki indikator tata kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2022	2021	2020
1.	Nilai Maturitas SPIP	3,196	3,145	2,4068
2.	Skor LKjIP	65 (B)	63,41 (B)	62,67 (B)
3.	Skor EKPPD	Proses	Proses	Proses
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Permasalahan Hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



6.	Pengembangan dan Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Ada	Ada	Ada
7.	Program untuk Perolehan Predikat ZIWBK/WBM	Ada	Ada	Ada
8.	Program untuk Perolehan Predikat Wilayah Tertib Administrasi	Ada	Ada	Ada

K. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*), sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan layanan APIP, baik berupa *assurance* maupun *consulting*.
2. Mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan *update* secara berkala atas seluruh risiko strategis melalui kegiatan manajemen risiko.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas seluruh risiko strategis perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Tarakan menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tarakan telah berada pada “**Level 3**” dengan skor “**3,000**” untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Felix Joni Darjoko

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian Selaku Pembina.
3. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
4. Inspektur Daerah Kota Tarakan.



Kesimpulan per Topik di Tiap Elemen

Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)					Simpulan Level
		Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)							
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	Level 3
2. Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	Level 3
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	Level 3
4. Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	Level 3
5. Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	13. Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	Level 3
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)							
6. Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	17. Assurance atas Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	T	Level 3
	18. Jasa Konsultasi (<i>Advisory Service</i>)	Y	Y	Y	T	T	Level 3





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Jalan Mulawarman No. 98 Tarakan, Kalimantan Utara 77111

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember sampai dengan Selasa tanggal 19 Desember Tahun 2023 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan rekonsiliasi data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Tarakan per 31 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana matriks terlampir.

Pelaksana Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut

Pemerintah Kota Tarakan

Tim Inspektorat Daerah

Shinta Damayanti
NIP 197507212008022001

Tim TLRHP

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Ketua Tim

Rodhiah Zulni
NIP 199009212018012003

Pengendali Teknis

Fernando Silalahi
NIP 197806172006041003

Mengetahui



Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Azis Hasan
NIP 197502121995011001



Kepala Subauditorat

Surya Hadi Saputra
NIP 198406122008081001

REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Perwakilan BPK
Entitas
Periode

: Provinsi Kalimantan Utara
: Kota Tarakan
: Semester II Tahun 2023

Dalam rupiah

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/Perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UKPD 2022	15	1.351.014.253,18	29	199.933.216,62	14	199.933.216,62	15	0,00	0	0,00	0	0,00	1.351.014.253,18
2	Kinerja BUMD 2022	13	0,00	34	0,00	7	0,00	27	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	UKPD 2021	13	1.705.545.272,19	34	23.589.000,00	19	21915000,00	15	1.674.000,00	0	0,00	0	0,00	1.681.956.272,19
4	PDAM 2021	15	0,00	30	0,00	29	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5	UKPD 2020	12	172.787.258,92	31	6.262.000,00	25	56.262.000,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	172.787.258,92
6	LHP Covid 2020	7	0,00	13	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	UKPD 2019	14	276.542.051,53	28	0,00	25	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	276.542.051,53
8	UKPD TA 2018	8	648.246.181,57	27	247.260.961,00	25	694.465,00	2	146.566.496,00	0	0,00	0	0,00	401.679.685,57
9	Kinerja Kesehatan JKN 2018	11	0,00	24	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	UKPD TA 2017	11	433.760.651,00	28	433.760.651,00	28	433.760.651,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	433.760.651,00
11	UKPD TA 2016	11	0,00	35	0,00	32	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	Manajemen Aset 2015, 2016, Sem I 2017	10	0,00	29	0,00	18	0,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
13	UKPD TA 2015	17	1.182.505.341,53	45	1.182.505.341,53	40	703.636.914,94	5	478.868.426,59	0	0,00	0	0,00	703.636.914,94
14	UKPD TA 2014	9	1.632.689.736,00	16	774.100.000,00	12	774.100.000,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	774.100.000,00
15	Sarana & Prasarana Dinas Pendidikan	10	0,00	16	0,00	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	PDAM 2015	10	635.427.688,08	26	635.427.688,08	25	635.427.688,08	1	0,00	0	0,00	0	0,00	635.427.688,08
17	UKPD TA 2013	11	1.156.735.663,48	28	1.045.540.660,88	26	1.045.543.905,88	2	(3.245,00)	0	0,00	0	0,00	1.156.738.908,48
18	UKPD TA 2012	15	1.025.399.930,66	26	1.025.399.930,66	23	1.005.672.507,67	3	19.727.422,99	0	0,00	0	0,00	1.005.672.507,67
19	BUMD	10	366.947.625,00	18	366.947.625,00	17	368.947.625,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	366.947.625,00
20	Pengelolaan BMD TA 2012 dan 2013	9	0,00	16	0,00	15	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
21	UKPD TA 2011	12	1.094.416.000,00	32	106.237.250,00	32	106.237.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	106.237.250,00
22	Betanja Modal Jalan TA 2011 dan 2012	8	5.708.451.744,44	21	5.708.451.744,44	17	5.326.005.237,29	4	382.446.507,15	0	0,00	0	0,00	5.326.005.237,29
23	UKPD TA 2010	13	317.522.089,10	26	230.645.375,10	25	161.356.210,00	1	69.289.165,10	0	0,00	0	0,00	161.356.210,00
24	Pendapatan Kota Tarakan	15	7.563.133.602,70	26	7.563.133.602,70	22	2.435.695.309,00	4	5.127.438.293,70	0	0,00	0	0,00	2.435.695.309,00
25	PDAM Kota Tarakan	11	0,00	21	0,00	20	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
26	UKPD TA 2009	17	334.157.173,13	39	334.157.173,13	39	334.157.173,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	334.157.173,13
27	UKPD TA 2008	20	1.763.205.768,56	52	1.763.205.768,56	48	1.502.259.884,56	4	265.245.884,00	0	0,00	0	0,00	1.497.959.884,56
28	Kinerja PDAM TB 2007/2008	12	102.611.394,00	25	102.611.394,00	25	102.611.394,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	102.611.394,00
29	UKPD TA 2007	19	10.828.947.984,00	31	10.828.947.984,00	30	10.499.266.634,00	1	329.681.350,00	0	0,00	0	0,00	10.499.266.634,00
30	Pengelolaan Pertambangan Batubara TA 2006/2007	2	7.323.200,00	7	7.323.200,00	7	7.323.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7.323.200,00
31	Dana Perimbangan	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
32	Bantuan Perpol TA 2006	6	90.000.000,00	7	90.000.000,00	6	55.000.000,00	1	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	55.000.000,00
33	UKPD TA 2006	24	20.589.436.194,66	52	20.589.436.194,66	50	18.212.886.194,66	1	2.376.550.000,00	0	0,00	1	0,00	18.212.886.194,66
34	Betanja TA 2006	11	2.443.065.596,99	20	2.443.065.596,99	20	2.443.065.596,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.443.065.596,99
35	UKPD TA 2005	19	24.922.691.875,00	42	24.922.691.875,00	42	24.922.691.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.922.691.875,00
36	Investigasi TA 2002/2003	7	27.524.729.979,49	8	27.524.729.979,49	8	27.524.729.979,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27.524.729.979,49
TOTAL		429	113.877.294.255,21	944	108.155.364.212,84	826	98.877.179.912,31	117	9.232.484.300,53	0	0,00	1,00	0,11%	102.589.249.754,68
PERSYARATAN PENYELESAIAN						87,50%		12,50%		0,00%		0,11%		

Kepala Sub Auditorat

Surya Hudi Saputra
NIP 198408122008081001

Tarakan, Desember 2023

Inspektur Kota Tarakan

Abd. Aziz Hasan
NIP 197502121995011001

Mengetahui
Kepala Perwakilan

Ruben Artia Lumbantorua
NIP 198010202006041005



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. Telp. (0551) 21072-21859 Fax : (0551) 21859 TARAKAN
Email : bawas@tarakankota.go.id Website <http://itwil.tarakankota.go.id>

LAPORAN

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
(SAKIP) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

NOMOR : 700.1.2.1 / 73/ 2023 / SAKIP

TANGGAL : 5 September 2023



2023



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. Telp. (0551) 21072-21859 TARAKAN (KODE POS : 77121)
Email : Inspektorat@tarakankota.go.id Website : <http://itwil.tarakankota.go.id>

Nomor : 700.1.2.1 / 73 / 2023 / SAKIP

Hal : Laporan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) OPD
2022.

Yth. Wali Kota Tarakan
di
Tarakan

Dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) 2022 pada Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

A. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

- a. Telah dilakukan penilaian/ evaluasi SAKIP terhadap 30 PD, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Utara, dengan kelemahan antara lain :

- Sebagian Perangkat Daerah belum menetapkan ukuran keberhasilan (Indikator) terhadap Tujuan Organisasi pada Dokumen Renstra;
 - Sebagian Perangkat Daerah belum melakukan Publikasi Dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui Website Resmi masing-masing OPD atau melalui Website Resmi Pemerintah Kota Tarakan) atau media lain yang memudahkan publik/ masyarakat untuk mengakses;
 - Sebagian Perangkat Daerah belum melakukan Evaluasi Internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi OPD;
 - Sebagian Perangkat Daerah belum melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.
 - Sebagian Perangkat Daerah belum andal dalam penyampaian informasi mengenai Kinerjanya pada Dokumen LKIP, seperti belum terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (Kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.
- b. Berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang telah dilaksanakan terhadap 30 PD diketahui PD yang memenuhi kriteria B sebanyak 33,33%, memenuhi kriteria BB sebanyak 50,00 % dan memenuhi kriteria A sebanyak 16,67 % dari jumlah PD yang telah dinilai hingga 28 Agustus 2023.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah yang telah dilakukan secara pragmatis, telah ditemukan beberapa kelemahan umum pada sebagian perangkat daerah dan direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Agar Perangkat Daerah menetapkan ukuran keberhasilan (Indikator) terhadap Tujuan Organisasi pada Dokumen Renstra;
- b. Agar Perangkat Daerah melakukan Publikasi Dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui Website Resmi masing-masing OPD atau melalui Website Resmi Pemerintah Kota Tarakan) atau media lain yang memudahkan publik/ masyarakat untuk mengakses;



- c. Agar Perangkat Daerah melakukan Evaluasi Internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi OPD;
- d. Agar Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.
- e. Agar Perangkat Daerah andal dalam penyampaian informasi mengenai Kinerjanya pada Dokumen LKIP, seperti belum terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (Kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

B. URAIAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil penilaian / evaluasi SAKIP, hasil penilaian dapat diuraikan dalam bentuk rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP terhadap 30 Perangkat Daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH		NILAI EVALUASI	PREDIKAT	KETERANGAN
	NOMENKLATUR	SINGKATAN			
1	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	75,40	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
2	SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	71,83	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
3	INSPEKTORAT	INSP	83,77	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
4	DINAS PENDIDIKAN	DISDIK	81,47	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

Handwritten signature

5	DINAS KESEHATAN	DINKES	84,42	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR	81,85	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	DPRKPP	79,91	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINSOSPM	63,84	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3APPKB	77,79	BB	Sangat baik, Akuntabel berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DKPP	72,05	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
11	DINAS PERIKANAN	DISKAN	66,51	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH	75,90	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL	78,31	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Handwritten signature

14	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB	60,35	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DKISP	71,03	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	86,30	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DISPUSPAN	74,22	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	DISBUDPORAPAR	75,93	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DKUKMP	69,68	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DPTK	78,24	BB	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
21	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATPOL PP DAN PMK	65,15	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan

Handwritten signature

22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPEDA LITBANG	77,50	BB	Sangat baik, Akuntabel,berkinerja baik,memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BPKPAD	68,53	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM	71,75	BB	Sangat baik, Akuntabel,berkinerja baik,memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL	60,15	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	65,24	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
27	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	CTT	68,65	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
28	KECAMATAN TARAKAN BARAT	CTB	74,97	BB	Sangat baik, Akuntabel,berkinerja baik,memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
29	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	CTG	71,99	BB	Sangat baik, Akuntabel,berkinerja baik,memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Handwritten signature

30	KECAMATAN TARAKAN UTARA	CTU	63,60	B	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
----	----------------------------	-----	-------	---	---

Sumber : LKE SAKIP Inspektorat Kota Tarakan

C. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah 2022 ini dibuat sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 ini dibuat sebagai pelaksanaan fungsi Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Standar Evaluasi SAKIP.

Tarakan, 5 September 2023



Inspektur,
Hasan, A.P, M.H
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 19750212 199501 1 001

Tembusan :

1. Walikota Tarakan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jalan Sulawesi RT 01, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan, Kaltara 77113
Laman : <http://inspektorat.tarakankota.go.id> Pos-el : bawas@tarakankota.go.id

Tarakan, 12 Januari 2024

Nomor : 900.1.15.5/047/Inspektorat
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pelaporan Kapabilitas APIP 2023**

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Tarakan**
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
di
Tarakan

Sehubungan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa Tingkat Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Tarakan Tahun 2023 **"Level 3"** berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur,



ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

28 Desember 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP
di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) IEPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Ditandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APIP
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

Urut	Kode PWK	No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
493	PW32	6	Kabupaten Mamuju Tengah	3.017	3	2.907	2	2.920	2	3.000	3
33			Maluku Utara								
494	PW33	1	Kabupaten Halmahera Utara	2.924	2	2.981	2	2.910	2	3.000	3
495	PW33	2	Kota Tidore Kepulauan	3.258	3	3.069	3	2.856	2	3.000	3
496	PW33	3	Kabupaten Halmahera Tengah	2.763	2	2.575	2	2.856	2	3.000	3
497	PW33	4	Kabupaten Pulau Taliabu	2.251	2	1.963	1	1.912	1	2.080	2
498	PW33	5	Kabupaten Halmahera Barat	3.207	3	3.177	3	3.096	3	3.000	3
499	PW33	6	Kabupaten Kepulauan Sula	2.175	2	2.100	2	2.162	2	2.190	2
500	PW33	7	Kabupaten Halmahera Selatan	3.132	3	2.881	2	2.856	2	3.000	3
501	PW33	8	Kabupaten Pulau Morotai	2.819	2	2.263	2	2.526	2	2.710	2
502	PW33	9	Kabupaten Halmahera Timur	2.892	2	2.719	2	2.586	2	2.130	2
503	PW33	10	Kota Ternate	3.022	3	3.169	3	2.856	2	3.000	3
34			Kalimantan Utara								
504	PW34	1	Kabupaten Nunukan	3.151	3	2.980	2	2.340	2	3.000	3
505	PW34	2	Kabupaten Malinau	3.137	3	2.860	2	2.220	2	2.080	2
506	PW34	3	Kota Tarakan	3.003	3	2.972	2	2.438	2	3.000	3
507	PW34	4	Kabupaten Bulungan	3.393	3	3.340	3	2.830	2	3.000	3
508	PW34	5	Kabupaten Tana Tidung	3.202	3	3.150	3	2.580	2	3.000	3

Rekap Kabupaten/Kota	SPIP	MRI	IEPK	APIP
Level 3	331	118	33	363
Level 2	140	341	395	118
Level 1	25	37	68	27
Tidak Evaluasi	12	12	12	0
Jumlah	508	508	508	508



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK-XI / 563 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/HK-III/159/2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN 2023

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta adanya perubahan nilai anggaran kegiatan, perlu mengubah Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-III/159/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-III/159/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-III/159/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023, diubah sebagai berikut :

1. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Inspektorat Kota Tarakan dengan Kode Kegiatan 6.01.02.2.01, 6.01.02.2.02, 6.01.03.2.01 dan 6.01.03.2.02.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Agustus 2023.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 November 2023

WALI KOTA TARAkan,

KHAIRUL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- XI / 563 / 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/HK-III/159/2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan adalah proses kegiatan pembinaan dan pengawasan intern yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Kota Tarakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Guna mewujudkan Misi ke-2 Wali Kota Tarakan yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat, Inspektorat Kota Tarakan perlu menyusun skala prioritas sasaran pengawasan secara tepat, aktual dan relevan.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Tarakan harus mampu merespon dengan memberikan jaminan keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) secara cepat dan tepat, serta efektif dan efisien berbagai permasalahan yang terjadi dalam rangka memberi masukan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta akuntabel pada tingkat strategis dan operasional sehingga perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Berdasarkan pada paradigma tersebut, serta mengacu pada perencanaan Pembinaan dan pengawasan Tahun 2023, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2023.

B. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/ kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - a. Pemeriksaan Investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/ harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Meliputi :
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) Reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

- 6) Monitoring P3DN dengan sasaran capaian progres dan penilaian progres sesuai aturan yang berlaku;
- 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan sasaran menilai keandalan pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) Monitoring Penyerapan anggaran/ Pemeriksaan Kas dengan Sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas Daerah telah sesuai dengan perencanaan;
- 10) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK serta Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

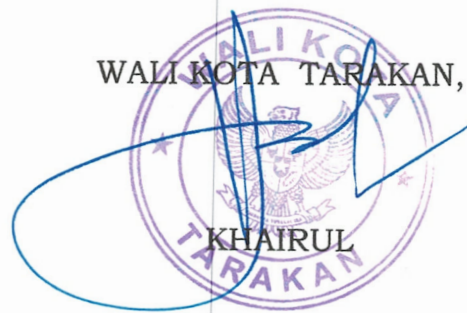
- 1) Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara RI;
- 2) Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar dengan Sasaran meyakini pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran memberikan dampak nyata khususnya untuk mendukung percepatan kinerja instansi pemerintah dan pencapaian indikator kinerja pembangunan nasional;
- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan Kepala PD dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 2) Kapabilitas APIP;
 - 3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara/ Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 4) Penilaian Zona Integritas;
 - 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penanganan Laporan Pengaduan (Whistle Blower System); dan
 - 7) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
5. Penegakan Integritas
- a. Dukungan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan Pemerintah Daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Ketaatan;
 - e. Audit Investigasi;
 - f. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - g. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - h. Pendidikan Sertifikasi di bidang Pengawasan lainnya.

WALI KOTA TARAKAN,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK- XI /563 /2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/HK-III/159/2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	PJ /P t	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
1	Reviu PBJ oleh APIP	Reviu	Menilai dan Melaporkan Hasil Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ	Bagian Pembangunan Setda, BPKPAD	Mg-II Feb 2023, Mg-II Jun 2023, Mg-II Sep 2023, Mg-II Des 2023	Mg-IV Feb 2023, Mg-I Jul 2023, Mg-I Okt 2023, Mg-IV Des 2023	1	2	1	4	8	107.242.590,00	4	LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
2	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu dan tugas pendampingan ke BPK-RI	Menilai LKPD Kota Tarakan apakah telah sesuai dengan SAP	BPKPAD dan beberapa Dinas Terkait	Mg-I jan 2023 s/d Mg IV Jan 2023	Mg-IV Maret 2023	2	4	2	8	16	33.805.075,00	1	LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
3	Reviu DAK Oleh APIP	Reviu	Menilai dan Melaporkan Hasil Penggunaan Dana DAK disejumlah OPD	BPKPAD dan beberapa Dinas Terkait	Mg-II Feb 2023 s/d Mg-II Des 2023	Mg-IV Feb 2023 s/d Mg-IV Des 2023	1	2	2	8	13	198.120.075,00	4	LHR	Laptop, ATK	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan
4	Reviu LPPD oleh APIP	Reviu	Menilai, Verifikasi dan Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah hingga TL	Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD Terkait	Mg-II Feb 2023 s/d Mg III Juni 2023	Mg-IV Juni 2023	1	2	1	5	9	18.416.200,00	1	LHR	Laptop, ATK	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan
5	Audit Dana BOS	Audit Ketaatan/ Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan Juknis Dana BOS	UPTD SDN dan SMP Dinas Pendidikan	Mg-II Feb 2023 s/d Mg-III Maret 2023	Mg-III Maret 2023	1	2	2	26	31	267.750.000,00	21	LHP	Kendaraan Operasional, Laptop, ATK	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	Wk PJ / P T	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
6	Monitoring Penyerapan anggaran/ Pemeriksaan Kas dengan Sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas Daerah telah sesuai dengan perencanaan	Monitoring/ Evaluasi/ Reviu	Pelaksanaan Hibah, Penyerapan Anggaran, dan pengelolaan Kas	OPD Terkait	Mg-I Jan 2023, Mg-IV Jan 2023	Mg-III Feb 2023	2	4	8	34	48	184.885.000,00	10	LAP	Laptop, ATK	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan
7	Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi	Audit Kinerja/ Probit/ Evaluasi/ Reviu	Monitoring Control for Prevention (Reviu HPS, SSH, HSB, Kinerja UKPBJ, Audit Kinerja Perizinan, Probit Audit, Dan Benturan Kepentingan	Sekretariat Daerah dan OPD Terkait	Mg-III Maret 2023 s/d Mg-IV Juli 2023	Mg-IV Juli 2023	2	4	12	36	54	178.500.000,00	13	LAP	Laptop, ATK	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan
8	Evaluasi Internal Zona Integritas	Evaluasi, asistensi dan pendampingan	Pengawasan penegakan integritas	OPD Terkait	Mg-II Maret 2023 s/d	Mg-IV Juli 2023	1	6	3	12	22	11.685.000,00	3	LHE	Laptop, ATK	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan
9	Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi	Asistensi, Pendampingan dan Evaluasi	Pengawasan Reformasi Birokrasi/ PMPRB Pusat (Offline/ Online)	OPD Terkait	Mg-II Maret 2023	Mg-IV Juni 2023	2	4	4	29	39	128.314.660,00	1	LHE	Laptop, ATK	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan
10	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Melakukan Update data temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan penanganan Kerugian	OPD Terkait	Mg-II Feb 2022- Mg-III Des 2023	Mg-I Mar 2023- Mg-IV Des 2023	2	4	4	29	39	97.765.000,00	6	LHM	Laptop, ATK	Rendah	Jumlah Tim Menyesuaikan
11	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Evaluasi	Menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Tingkat Perangkat Daerah	Seluruh OPD	Mg-III Maret 2023 s/d Mg-III Des 2023	Mg-IV Des 2023	1	4	4	18	27	130.120.075,00	30	LHE	Laptop, ATK	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan
12	Peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi Mandiri	Mengukur dan Menilai Peningkatan Kapabilitas APIP secara Internal	Inspektorat	Mg-II Maret 2023 s/d Mg-IV	Mg-II Jul 2023	1	2	1	4	8	92.065.000,00	1	LHE	Laptop, LCD, ATK, Makan/ minum	Sedan g	Jumlah Tim Menyesuaikan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	W/P	P/P	KT	AT		Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
13	OPD Terkait	Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi	Pendampingan Penyusunan RTP 2022, Asistensi penyelenggaraan SPIP di tingkat OPD, Mengukur dan Menilai Maturitas SPIP tingkat Perangkat Daerah dan	Seluruh OPD	Mg-I Jan 2023 s/d Mg-IV Feb 20223	Mg-I Maret 2023	1	2	3	9	15	41.310.000,00	3	LHE	Laptop, LCD, ATK, Makan/minum	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan
14	Reviu Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah	Reviu	Menilai dan Melaporkan Hasil perencanaan dan penganggaran Untuk Tahun 2023	OPD Terkait	Mg-II Mei 2023 s/d Mg-III Des 2023	Mg IV Des 2023	2	4	2	14	22	46.105.075,00	2	LHR	Laptop, ATK	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan
	Tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RKA SKPD)																
15	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Pendampingan, Asistensi dan Evaluasi	Pendampingan Penyusunan RTP 2022, Asistensi penyelenggaraan SPIP di tingkat OPD, Mengukur dan Menilai Maturitas SPIP tingkat	Seluruh OPD	Mg-II April 2023 s/d Mg-III Juni 2023	Mg-IV Juli 2023	1	2	5	30	38	88.400.000,00	2	LHE	Laptop, LCD, ATK, Makan/minum	Sedang	Jumlah Tim Menyesuaikan
16	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum	Join Audit/ Audit Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai Permintaan pihak APH	OPD Terkait/ Subjek Terkait	Mg-I Maret 2023 s/d Mg III Des 2023	Menyesuaikan	1	2	8	32	43	40.987.000,00	3	LAP	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
17	Penanganan Kasus Pengaduan/Permintaan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai Permintaan Kepala Daerah	OPD Terkait/ Subjek Terkait	Mg-I Feb 2023 s/d Mg III Des 2023	Menyesuaikan	2	2	5	15	24	177.325.200,000	7	LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
18	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.	Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Budaya.	Mg-IV Maret 2023 s/d Mg-IV	Mg IV Juni 2023	1	2	1	4	8	30.685.000,00	1	LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.	Audit PBJ	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang Jasa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.	Mg-II Juni s/d Mg- IV Agust 2023	Mg-II Sep 2023	1	2	1	6	10	18.000.000,00	1	LHP	Kendaraan Operasional, Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	W/PJ/P	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
20	Program penataan bangunan dan lingkungan.	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program penataan bangunan dan lingkungan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Mg-II Juni 2023	Mg-I Jul 2023	1	2	1	5	9	27.235.000,00	1	LHP	Kendaraan Operasional, Laptop,	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Audit Ketaatan/ Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utility Umum (PSU)	Mg-I Okt 2023	Mg-IV Okt 2023	1	2	1	6	10	20.550.000,00	1	LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Jumlah Tim Menyesuaikan
23	Upaya Penanganan Gratifikasi	Sosialisasi	Sebagai upaya <i>Early Warning System</i> pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota	OPD Terkait	Mg-I Okt 2023	Mg-IV Okt 2023						35.327.190,00	1	LAP	Laptop, LCD, ATK, Makan/ minum	Ringan	Jumlah Tim Menyesuaikan
24	Layanan Jasa Advise	Sosialisasi/ Workshop/ <i>Coaching Klinik</i>	PBJ Darurat, Reformasi Birokrasi, PBJ Swakelola, Peraturan PBJ	OPD Terkait	Mg-I Jan s/d Mg III Des 2023	Mg- Mg IV Jan s/d Mg IV Des 2023	1	2	3	9	15	9.112.660,00	1	LHE	Laptop, LCD, ATK, Makan/ minum	Rendah	Jumlah Tim Menyesuaikan
TOTAL												1.983.705.800,00	118	LAP			

WALI KOTA TARAKAN,

